

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Standard Operating Procedure Nomor KPP40-0010 Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Penagihan*. Diakses 19 Maret 2022, dari <https://www.pajak.go.id/id/penagihan>.
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Kurniasari, P. K., Suharyono, S., & Kesuma, A. I. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan keuangan*, 21-31.
- Kurniawan, A. M. (2011). Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 478-487.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011) *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (n.d.). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya).
Jurnal Akuntansi, 1-11.

Menteri Keuangan. 2020. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Pelaksanaan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Najoan, M. P., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 576-584.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rao, S. S. (2019). *Engineering Optimization: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.

Winardi, J. (1996). *Manajemen supervisi*. Bandung: Mandau Maju.